IMPLEMENTASI ATPEE PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TEJO KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO DALAM PENCAPAIAN *GOOD GOVERNANCE*

SKRIPSI

Oleh :

DWI BUSTANIL MA'RIFAH

NIM : G72216030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2019

IMPLEMENTASI ATPEE PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TEJO KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO DALAM PENCAPAIAN *GOOD GOVERNANCE*

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Srata Satu

Akuntansi

Oleh :

DWI BUSTANIL MA'RIFAH

NIM : G72216030

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Surabaya

Program Studi Akuntansi

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda di bawah ini saya:

Nama : Dwi Bustanil Ma'rifah

NIM : G72216030

Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi

Judul Skripsi : Implementasi ATPEE Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Desember 2019

METERAI TEMPEL
6F77AAEF500566175
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dwi Bustanil Ma'rifah

NIM. G72216030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Bustanil Ma'rifah NIM. G72216030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 Desember 2019

Pembimbing

Siti Musfiqoh, MEI

NIP. 197608132006004 2002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Bustanil Ma'rifah NIM.G72216030 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana srata satu bidang Akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Siti Muthiqoh,MEI
NIP. 1976081320060042002

Penguji II,

Hastanti Agustin,R,SE,M.Acc,AK,CA,BKP
NIP.198110142014031002

Penguji III,

Nurul Lathifah,S.A.,M.A
NIP.198905282018012001

Penguji IV,

Binti Shofiatul Jannah, M.S.A
NIP. 199007292019032022

Surabaya, 19 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Dr. H. Ali Arifin, MM
NIP. 19621214199303100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Bustanil Ma'rifah
NIM : G72216030
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi
E-mail address : dwibustanilmarifah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN SunanAmpel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusifatas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
Yang berjudul :

Implementasi ATPEE Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibat kan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Desember 2019

Penulis

(Dwi Bustanil Ma'rifah)
G72216030

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Implementasi ATPEE Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian Good Governance"**ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana Analisis Implementasi ATPEE Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance* dan Kendala Implementasi ATPEE Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan 3 metode, pertama observasi yaitu pengamatan secara langsung di tempat penelitian, kedua wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendaha Desa, BPD, Kaur Perencanaan, Kaur TU dan Umum, Kaur Keuangan, Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Tejo, dan ketiga dokumentasi yang kemudian diolah dan dianalisis setelah itu disimpulkan dan diimplementasikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya mengimplementasikan Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Efektivitas dan Efisiensi karena kurangnya wawasan bendahara desa dalam penatausahaan sehingga laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan secara tepat waktu, belum adanya papan informasi yang menginformasikan keluar masuknya anggaran dan web desa yang menginformasikan kegiatan pemerintahan desa, kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada warga tentang program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut, kurangnya perencanaan dan penganggaran pembangunan desa belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Saran yang disampaikan peneliti kepada pemerintahan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro supaya mendorong penyelenggaraan *good governance* agar dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlakudan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hendaknya mengadakan bimbingan teknis kepada aparatur desaagar kemampuan sumber daya pemerintah desa lebih meningkat sehingga dapat tercapainya pemerintah yang baik yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dan tercapainya visi Desa Tejo "Menjadikan Desa Tejo Bangkit Menuju Bojonegoro Matoh"

Kata Kunci : Akuntabilitas, Tranparasi, Partisipasi, Efektivitas dan Efisiensi, pengelolaan keuangan Desa, *Good Governnace*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Serta tak lupa sholawat salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhamad SAW yang sudah menuntun kita ke jalan yang terang benerang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi ATPEE Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance*"**dengan lancar yang digunakan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Peneliti menyadari bahwa telah mendapat dorongan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkanwaktu pikiran tenagadan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siti Musfiqoh, MEI, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga selaku Dospem Pembimbing Skripsi yang telah memberi saran dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi.
4. Fatikul Himami, MEI, selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Imam Buchori, SE, M. Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah memberikan kritik dan saran saat pengajuan judul skripsi.
6. Noor Wahyudi, M.Kom, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi yang telah memberikan saran dan membantu memeriksa kesamaan judul di Prodi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Andhy Permadi. M. Kom, selaku Dosen Wali yang telah membantu menyelesaikan persyaratan sidang skripi dan memberi semangat.
8. Pihak pemerintah Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang telah meluangkan waktunya dan bersedia dijadikan objek penelitian.
9. Ibu dan Bapak serta Kakak saya Terima Kasih atas doa, kasih sayang serta pengorbanan yang tidak ada habisnya.
10. Teman-teman akuntansi angkatan 2016 yang telah menemani perjalanan kuliah saya.
11. Teman-teman KKN 69 yang telah menyemangatidan memberi saran kepada saya.
12. Teman-teman FKMB yang telah telah menyemangati dan memberi saran kepada saya.
13. Teman-teman Kos Bu Hadi yang sudah mendengarkan keluh kesah saya serta memberi saya semangat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN..... iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iv
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah..... 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pusaka 13
E. Tujuan Penelitian 19
F. Kegunaan Hasil Penelitian 19
G.Definisi Operasional 20
H.Metode Penelitian 22
I. Sistematika Pembahasan 29
BAB II.....31
KAJIAN PUSTAKA.....31
A. Akuntabilitas 31
1. Pengertian Akuntabilitas..... 31
2. Jenis–Jenis Akuntabilitas 31
3. Indikator Akuntabilitas 33
4. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas 33
B. Transparansi 34
a. Pengertian Transparansi..... 34
b. Bentuk dan Tujuan Transparansi 34
c. Prinsip-Prinsip Transparansi 35
d. Indikator Transparansi 36
C. Partisipasi 36
a. Pengertian Partisipasi..... 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bentuk partsipasi 37
c. Manfaat Partisipasi 38
D. Efektivitas Dan Efisiensi 38
a. Pengertian Efektivitas dan Efisiensi 38
b. Indikator Efektivitas dan Efisiensi 39
E. Pengelolaan Keuangan Desa 39
a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa 39
b. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa 41
F. Good Governance 43
a. Pengertian *Good Governance* 43
b. Prinsip - Prinsip *Good Governance* 44
BAB III 47
DATA PENELITIAN 47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 47
1. Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 47
2. Sejarah Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 48
3. Letak Geografis Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro . 48
4. Visi dan Misi Desa Tejo Kecamatan Knaor Kabupaten Bojonegoro 49
5. Struktur Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 51
6. Logo Lambang Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro .. 52
7. Implementasi ATPEE Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro 54
BAB IV 73
ANALISIS DATA 73
A. Analisis Implementasi Dan Kendala ATPEE Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance* 73
1. Perencanaan Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Govenance* 74
2. Pelaksanaan Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance* 76
3. Penatausahaan Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance* 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pelaporan Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance* 80

5. Pertanggungjawaban Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance* ... 80

BAB V.....82

PENUTUP.....82

A. Kesimpulan 82

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN.....88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Desa 51
Gambar 3. 2 Logo Lambang Desa Tejo 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Tejo 64
Tabel 3. 2 Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan 65
Tabel 3. 3 Pertangungjawaban APBDesa Tejo Tahun 2018..... 66
Tabel 3. 4 Program Sektoral Tahun 2018 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwasanya, "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".[1]Dasar aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka dibentuklah pemerintahan desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yakni kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur suatu desa untuk bisa menggunakan dan mengatur pemerintahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh program pemerintah pusat terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Sehingga desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dan tentu saja berimplikasi pada kemampuan para aparatur desauntuk mengelola keuangan desa. Diharapkan aparatur desa dapat mengelola keuangan desa secara tertibberdasarkan peraturan yang berlaku.

[1]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan perubahan dari Permendagri Nomor113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaankeuangan desa tersebut dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)yang berasal dari unsur penyelenggara pemerintahan desa.[2]

Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa Tejo menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja pemerintah Desa (RKPDesa) yang berlandaskan partisipasi dan tranparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. RPJMDesa merupakan penjabaran visi misi dari kepala desa dan setiap tahun harus melaporkan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).[3]Perencanaan menyangkup bidang kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan desa. Program desa berangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi dan problem yang dihadapi masyarakat.

Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah desa mengelola dan menggerakkan sumberdaya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan pada saat

[2] Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tantang Pengelolaan Keuangan Desa.
[3] Rencana Kerja Pemerintah Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RKPsesuai dengan jadwal yang ditentukan.[4] Pemerintah desa bertanggungjawab dalam pelaksanaan program.

Dalam tahap penatausahaan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam proses penatausahaan bendahara merekap buku kas umum, buku kas pembantu pajak melampirkan laporan pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan merekap seluruh pengeluaran dan pemasukan yang telah digunakan PemerintahanDesa Tejo Kecamatan Kanor Kabupeten Bojonegoro.[5]

Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan Bupati dan juga disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

1. Laporan kepada Bupati (melalui camat) meliputi:
   a. Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDesa.
   b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati setiap akhir tahun.
   c. Laporan realisasi penggunanaan dana desa.
2. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
   a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenan.
   b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan.

[4] Didit Herlianto, *Manajemen Pembangunan Desa*, (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2017),12.
[5] Mahmudah, *wawancara*, Kaur Perencanaan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, 4 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa.[6]

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mulai tahun 2015desa akan mendapatkan Dana Desa kurang lebih Rp. 1 Miliar.Tetapi nominal yang diberikan pada masing-masing desa berbeda tergantung dari geogafis desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan angka kematian.[7]

Desa memiliki banyak sumber pendapatan. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) berupa Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Bagi Hasil Pajak dan Lain Lain Pendapatan Desa yang sah. Sedangkan Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.[8]

Desa yang sudah menerima dana alokasi desa harus mampu untuk melakukan pengelolaan keuangan tersebut sehingga pembangunan desa dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.Sehingga dengan hak otonom tersebut, desa dapat mengelola keuangan secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan

[6]Qomarudin, *wawancara,*Kepala Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, 4 September 2019.
[7]https://regional.kompas.com/read/2018/08/05/08580611/2019-desa-diharapkan-dapat-dana hingga-rp-13miliar-per-tahun?page=alldiakses pada tgl 10 November 2019 pukul 05.04 WIB.
[8] Peraturan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pertanggung Jawaban Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggaran. Kebijakan ini memaksa Pemerintah Desa Tejo untuk memahami tata cara pengelolaan keuangan yang baik sebagai salah satu komponen *good governance*.

Pengelolaan keuangan yang baik dengan prinsip-prinsip *good governance*merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja pemerintahan desa melalui *supervise* atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap pengelolaan dana desa berdasarkan pada kerangka peraturan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pemerintahan dalam mengupayakan terwujudnya kepemerintahan yang baik tersebut ditentukan oleh seberapa besar prinsip atau asas kepemerintahan yang baik tersebut diimplementasikan. Apabila prinsip kepemerintahan yang baik tersebut dapat diimplementasikan secara sempurna atau maksimal, akan dicapai kualitas pelayanan yang baik, kesejahteraan masyarakat dan tercapainya visi Desa Tejo. Visi "Menjadikan Desa Tejo BangkitMenuju Bojonegoro Matoh". Matoh diartikan sebagai slogan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Kata ini digunakan untuk mengapresiasi kinerja yang bagus dan dapat diandalkan.

Menurut Hardiwinoto (2017), *Good Governance* merupakan konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good Governance* adalah konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara.[9]Dalam *Good*

[9] Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Governance terdapat 9 prinsip yaitu: Akuntabilitas *(Accoutability)*, Tranparansi *(Tranparancy)*, Partisipasi *(Participation)*, Efektifitas dan Efisiensi *(Efectivennes and Eficiency)*, Visi Srategis *(Strategic Vision)*, Kesetaraan *(Equity)*, Berorientasi pada Konsensus*(Consensus)*, Peduli pada Masyarakat dan Tegaknya Supremasi Hukum*(Rule Of law).*[10]

*Good Governance*atautata kelola pemerintahan yang baik, apabila pemerintah berhasil menyelenggarakan sistem pengaturan pembangunan yang baik, bertanggungjawab dengan prinsip demokrasi serta efisien. Disamping itu, tata pengelolaan yang baik tersebut agar terhindar daripenyimpangan, kesalahan, penyelewengan alokasi pembangunan juga termasuk penanggulangan dini tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang memincangkan tata kelola pemerintahan sebagai *problem*yang sangat serius. Pada Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai lembaga independen. Pemerintah sebelumnya juga menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaran negara yang bersih, amanah dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).[11]

Melihat dari prinsip *Good Governance* ini, adanya dana desa yang dialokasikan ke desa cukup besar, agar dapat dilaksanakan dengan baik sehingga perlu adanya indikator pengukuran pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Bab 5 Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 tentang indikator

[10] Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (Good Governance)*, (Yogyakarta:Andi Yogyakarta, 2010),25.
[11] Mudrajat Kuncoro, *Otonomi & Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Erlangga, 2010), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa yakni: Akuntabilitas, Tranparansi, Partisipatif, Efektivitas dan Efisiensi.[12]

Indikator pertama yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap anggaran dan program penyelenggaraan negara harus dapat dipertangungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[13] Jadi, Akuntabilitas pada Pemerintahan Desa Tejo sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.

Indikator kedua yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan penyelenggara pemerintahan desa dalam memberikan informasi yang terkait dengan efektivitas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat.[14] Kegiatan yang dibiayai dengan dana desa harus direncanakan,dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.[15]Adanya keterbukaan ini, akan lebih memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa. keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa Tejo.

---

[12] Undang-Undang Pasal 24 Bab 5 Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peenyelenggaraan Pemerintah Desa.
[13] Mardiasmo, Otonomi &Manajemen Keuangan Daerah (Good Governance), (Yogyakarta: Andi Yogyakarta,2010), 26.
[14]Ibid.,26.
[15]Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Pasal 13 Tahun 2010 tentang Desa .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indikator ketiga yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah Partisipasi Masyarakat. Partisispasi masyarakat adalah kesediaan masyarakat untuk membantu kelangsungan program yang tercermin dari pikiran, sikap dan tindakan mereka berdasarkan model kerangka partisipasi yang dikembangkan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.[16]Partisipasi merupakan proses saling belajar bersama antara pemerintah dan masyarakat, cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan misi Desa Tejo. "Menumbuhkembangkan kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan desa dan pembinaan masyarakat pada umumnya, demi terwujudnya pemberdayaan msyarakat yang mandiri dan berkualitas"

Indikator keempat yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah Efektivitas dan Efisiensi. Efektivitas merupakan suatu proses dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisiensi adalah bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan.[17]Pemerintah desa dalam merencanakan anggaran, terlebih dahulu memperhitungkan efisiensi dan efektivitas atas dana desa yang akan dikelola, agar penggunaan dana dan tujuan pembangunan desa dapat tercapai maksimal.

Kabupaten Bojonegoro adalah suatu kabupatenyang mampu meningkatkan pembangunan dengan cepat. Bojonegoro merupakan kota kecil yang terletak diujung barat pronvinsi Jawa Timur, walaupun Bojonegoro

[16] Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (Good Governance)*,(Yogayakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 26.
[17]Ibid.,27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kota kecil, tapi disini banyak tersimpan hal-hal yang patut dieksplor lebih dalam, baik dari segi sejarah,budaya dan bagaimana masyarakatnya berkembang. Potensi besar di Agkling Dharmayang terkenal kota ledre sudah menjadi bahan berbincangan sejak tahun 2006 silam. Dalam hal ini, mengandung cadangan migas sebesar 7,7 triliun kaki kubik minyak bumi atau setara dengan 650 juta barel. Inilah yang membuat Bojonegoro menjadi sorotan publik sebagai daerah penghasil minyak yang akan menopang kebutuhan minyak nasional. Bahkan Bojonegoro menjadi sumber minyak bumi se Asia Tenggara. Pendapatan Bojonegoro dari dana bagi hasil (DBH) migas cukup besar. Tahun ini kurang lebih Rp.900 miliar telah digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Selian itu, upah minimum regional yang hanya Rp.1,4 juta per bulan mengundang daya tarik investor lain untuk menanam modalnya dan menjadi penyumbang kebutuhan 20% migas nasional.[18]

Desa Tejo merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Desa Tejo terdiri dari 5 dusun, 2 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT). Mayoritas penduduk Desa Tejo hanya mampu menyelesaikan sekolah jenjang SD dan SMP/Sederajat. Masyarakat Desa Tejo memiliki berbagai macam mata pencaharian dari beberapa sektor, yaitu: sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor perikanan dan lain-lain. Mayoritas penduduk di Desa Tejo adalah buruh tani, saat musim kemarau masyarakat dapat menggunakan embung desa sebagai sumber air bagi lahan

[18]Ani Susanti Hartoyo,SE, *wawancara*, Profesi Kepala Sib Bidang Akuntansi Pertanggungjawban dan Pelaksanaan APBD BPKAD Bojonegoro,16 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertaniannya. Di Desa Tejo terdapat BUMDES yang berimbas pada peningkatan perekonomian desa, menjadikan desa lebih mudah mengupayakan pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah di atasnya. Desa Tejo adalah satu satunya desa di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki alun-alun mini yang diberi nama Alun Alun Tejo Kinasih sebagai bentuk ekonomi kreatif, sehingga memberikan konstribusi bagi peningkatan pendapatan berupa pendapatan sewa di desa tersebut.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Bojonegoro. Memberikan jaminan bahwa setiap desa akan menerima dana desa dari pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan desa. pelaksanaan dana desa menggunakan prinsip hemat,terarah dan terkendali. Dan kewajiban kepala desa dalam penyampaiaan laporan realisasi penggunanan dana desa kepada bupati melalui tim pendamping kecamatan. Dalam Peraturan Bupatijuga dijelaskan apabila aparatur desa melanggar ketentuan akan diberikan sanksi penundaan peyaluran dana desa.

Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan dana desa yang seharusnya dilaksanakan secara profesioanal,akuntabilitas,tranparansi, partisipasi,efektifitas dan efisiensi yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari penyelewengan, penyimpangan dan korupsi.

Alasan peneliti memilih Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro karena pelaksanaan *Good Governance* dalam pemerintahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DesaTejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro masih belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat, Aspek Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa belum berjalan maksimal, dalam proses ini di desa Tejo proses penatausahaan lebih banyak dikerjakan oleh kaur perencanaan karena kurangnya pengetahuan dan wawasan bendahara desa dalam proses penatausahaan yang menyebabkan proses pelaporan laporan pertanggungjawaban tidak dapat disampaikan secara tepat waktu. Transparansi pengelolaan keuangan desa belum maksimal, belum adanya papan informasi yang menginformasikan pengeluaran dan pemasukan anggaran dan website desa sebagai media pelayanan publik, manajemen informasi dan menginformasikan kegiatan pemeritah. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut, salah satu penyebab membuat masyarakat kurang berpartisipasi. Sedangkan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang dilakukan Pemerintah Desa Tejo belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan warga sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif dan efisiensi.[19]

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Implementasi ATPEE Pada Pengelolaaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance*".**

[19]Ahmad Rizal, Sekretaris Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, 5 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Identifikasi masalah yang diajukan untuk menggambarkan pokok permasalahan dalam suatu penelitian. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a. Kurangnya wawasan dan pengetahuan bendahara desa dalam penatausahaan sehingga laporan pertangggungjawaban tidak dapat disampaikan tepat waktu.
   b. Kurangnya transparansi dalam proses pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tejo.
   c. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut.
   d. Perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang dilakukan pemerintah desa belum sepenuhnya disesuaikan dengan sebutuhan warga sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa yang tidak efektif dan efisien.

2. Batasan Masalah

   Dalam penelitian ini perlu adanya batasan agar pembahasan masalah lebih terfokus dan spesifik dalam penelitian ini.

   a. Implementasi akuntabilitas pada pengolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Implementasi transparansi pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*.

c. Implementasi partisipasi pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*.

d. Efektivitas dan Efisiensi pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupeten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*.

e. Kendala-kendala implementasi ATPEE pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis implementasi ATPEE pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*?
2. Bagaimana kendala implementasi ATPEE pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*?

D. Kajian Pusaka

1. Penelitian yang dilakukan Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G dan Suharto (2018), yang berjudul "Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa". Penelitian ini menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, tranparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campursari sudah berjalan namun belum maksimal.Persamaan penelitian ini adalah sama meneliti akuntabilitas, transparansi pada pengelolaan keuangan desa, sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian sekarang meneliti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan desa dan penelitian terdahulu hanya meneliti akutabilitas dan transparansi.[20]

2. Penelitian yang dilakukan Anifah, Meyzi Heriyanto dan Muchid (2018), yang berjudul "Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*". Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusi Utara Kabupaten Rokan Hulu belum dilaksanakan secara optimal walaupun sudah melaksanakan setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Persamaan penelitian ini adalah sama meneliti pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan *good governance*. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sekarang meneliti ATPEE pada pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian *good governance* sedangkan

[20]Kabul Setio Utomo ,et al.*Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*.(Jurnal Akuntansi, Vol.13, Universitas Sebelas Maret, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian terdahulu hanya meneliti salah satu prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas.[21]

3. Penelitian yang dilakukan Alfian Hamid (2016),yang berjudul "Tranparansi Akuntabilitas Pengelolaan Keungan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance* (studi empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupeten Gowa)". Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan ADD di 3 desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan tranparansi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama meneliti akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan desa. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian sekarang membahas ATPEE pada pengelolaan keuangan desa sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas dua prinsip *good governance*yaitu akuntabilitas dan transparansi.[22]
4. Penelitian yang dilakukan Titiek Puji Astuti dan Yulianto (2016), yang berjudul "*Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014". Penelitian ini menggunakan metode studi kasus *(case study)*Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu aspek

[21]Anifah,et al, *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, (Jurnal Akuntansi, Vol.4, Universitas Riau, 2018).
[22] Alfian Hamid, *Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di kecamatan Bontomarannu Kabupeten Gowa)*, (Jurnal Akuntansi,Vol.6, Universitas Islam Negeri Allauddin Makasar, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting untuk menunjukkan aspek *good governance* pada pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hambatan dalam pelaksanaan *good governance* pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada dipemerintah desa yang tidak cakap. Persamaan dari penelitian ini adalah sama meneliti transparansi,akuntabilitas dan partisipasi pada pengelolaan keuangan desa. perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sekarang membahas ATPEE pada pengelolaan keuangan desa sedangkan penelitian yang terdahulu hanya membahas akuntabilitas,transparansi dan partisipasi.[23]

5. Penelitian yang dilakukan Yul Aeni Yusuf, Lalu Hamdani Husnan, Roro Pancawati Martiningsih (2017), yang berjudul "*Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berspektif Permendagri Nomor 113 Tahun 2014". Penelitian ini menggunakan Metode Studi kasus Kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan kurangnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Persamaan pada penelitian ini adalah sama meneliti akuntabilitas, transparansi, partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Perbedaan penelitian ini adalah

[23]Titiek Puji Astuti, Yulianto, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. (Jurnal Akuntansi, Vol. 4, Universitas Setia Budi Surakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelian sekarang meneliti ATPEE pada pengelolaan keuangan desa sedangkan penelitian terhadulu hanya meneliti tiga prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.[24]

6. Penelitian yang dilakukan Hilda Octavana dan Siti Muslihah (2019), yang berjudul "Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bantul Yogyakarta". Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *good governance*yakni akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi di Desa BantulYogyakarta secara umum baik meskipun dari beberapa indikator perlu ditingkatkan melalui pelatihan pemerintah desa dan masyarakat terutama mengenai inovasi dan prinsip-prinsip orientasi jangka panjang yang harus dimiliki sehingga desa dapat lebih mandiri dan berkembang lebih cepat. Persamaan penelitian ini adalah sama meneliti akuntabilitas, transapransi, efektifitas dan efisiensi. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian sekarang meneliti ATPEE pada pengelolaan keuangan desa sedangkan penelitian terdahulu meneliti tiga prinsip *good governance* yakni akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.[25]

---

[24]Yul Aeni Yusuf,et al., *Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berspektif Permendagri Nomor 113 Tahun 2014*. (Jurnal Akuntasi, Vol.12 , Universitas Mataram, 2017).
[25] Hilda Octavana ,Siti Muslihah, *Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bantul Yogyakarta*, (Jurnal Akuntansi, Vol.6, Universitas Gadjah Mada, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Bukit Buchori Siagian, Maryunani, Rahmad Krishna, Dwi Budi Santoso (2016), yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi pada Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian *Good Governance*". Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Penelitian ini membahas Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaaan Keuangan Desa dan Menganalisis Faktor Penghambat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih lemahnya prinsip efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun faktor penghambat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaaan keuangan desa yakni: Kurangnya transparansi musrenbang kepada masyarakat, kurangnya transparansi dalam penganggaran, dan kurangnyapengawasan kualitas informasi dan akses informasi. kurangnya pemantauan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa. Persamaan pada penelitian ini adalah penelitian ini membahas efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan desa. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini meneliti prinsip ATPEE pada pengelolaan keuangan desa sedangkan penelitian terdahulu hanya meneliti efektvitas dan efisiensi.[26]

[26] Bukit Bukhori Siagan, Et al., *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pada pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Good Governance*.(Jurnal Akuntansi and Bisnis, Vol.2, Universitas Brawijaya:2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitan ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis implementasi ATPEE pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*.
2. Untuk mengetahui kendala implementasi ATPEE pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupeten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan disiplin ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik untuk Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk media informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai akuntansi sektor publik khususnya masalah*good governance* pada pengelolaan keuangan desa.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Universitas

      Digunakan sebagai literatur dan referensi karya tulis ilmiah untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya khususnya pada mahasiswa Jurusan Akuntansi.

b. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis mendapat pengalaman dan tambahan wawasan tentang akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian *good governance.*

c. Bagi Pemerintah Desa Tejo

Dengan adanya penelitian ini kami harapkan menjadi masukan serta pertimbangan kepada Pemerintah Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam mendorong penyelenggaraan *good governance*agar mengelola keuangan desa dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

G. Definisi Operasional

Dengan judul skripsi Implementasi ATPEE Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupeten Bojonegoro Dalam Pencapaian Good Governance, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci sebagai berikut :

1. ATPEE

ATPEE adalah singkatan dari Akuntabilitas, Tranparansi, Partisipasi, Efektivitas dan Efisiensi yang merupakan prinsip dari tata kelola pemerintah yang baik *(good governance)*. ATPEE

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai indikator pengukuran pengelolaan keuangan desa yang tercantum di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

   Pengelolaan Keuangan Desa adalah proses mengelola keuangan desa atau anggaran dana desa yang diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban dari pihak yang terkait seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa serta perangkat desa lainnya. Keberhasilan dari pembangunan di desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik.

3. Desa Tejo

   Desa Tejo adalah desa yang beralamatkan di Jalan Pasinan, Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Desa Tejo terdiri dari 5 dusun, 2 Rukun Warga (RW), 14 Rukun Warga (RT). Mayoritas penduduk Desa Tejo hanya mampu menyelesaikan sekolah dijenjang pendidikan SD dan SMP/Sederajat. Masyarakat Desa Tejo berbagai macam mata pencarian yang dibagi dari beberapa sektor yakni: pertanian, sektor jasa/perdagangan, sektor perikanan dan lain lain. Di Desa Tejo terdapat alun-alun mini, dimana menjadi satu satunya yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan adanya alun alun mini ini memberi konstribusi pendapatan Desa Tejo berupa pendapatan sewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Good Governance*

Good Governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta dan masyarakat.[27]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan dan memahami fakta yang ada dalam objek yang diteliti.[28]Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah metode yang menggambarkan data yang terkumpul dari beberapa literatur-literatur yang dapat digunakan untuk menjawab suatu permasalahan.[29]

2. Data Penelitian

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan atau wawancaraterkait tentang ATPEE pada pengelolaan keuangan desa. Peneliti

[27] Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah Good Governance,* (Yogyakarta :Andi Yogayakarta, 2015),20.
[28] Lexy,J.Molcong. *Metode Penelitian Kualitatif.*(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), 6.
[29]Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 20014), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewawancarai dari beberapa pihak yang bersangkutan, yakni:

1. Kepala Desa Tejo
2. Sekretaris Desa Tejo
3. Kaur Perencanaan Desa Tejo
4. Kaur keuangan Desa Tejo
5. Kaur TU dan Umum Desa Tejo
6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tejo
7. Tokoh Agama Desa Tejo
8. Masyarakat Desa Tejo

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder antara lain:

1. Profil Desa Tejo Kecamata Kanor Kabupaten Bojonegoro yang mencangkup tentang visi dan misi desa.
2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tahun 2018.
3. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tahun 2018.

3. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunaan data yang diperoleh dari dua sumber, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data terkait objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah perangkat dan masyarakat Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupeten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data berupa data dokumentasi dan data laporan.[30]Sumber penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Selain itu peneliti menggunakan dari buku, jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

[30]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi *(Interviewer)* dengan orang yang akan memberikan informasi *(Interviewew)* dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan permasalahan yang dibahas.[31] Dalam hal ini peneliti mewawancarai kepala desa, sekretaris desa, kaur perencanaam, kaur keuangan, kaur TU dan umum, BPD, tokoh agama dan masyarakat Desa Tejo terkait akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti

[31] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2010), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan pancaindra.[32]Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti. Dalam hal ini penelitimengamati tentang implementasi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi pada pengelolaaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan penelusuran data.[33]Sehingga dari data yang diperoleh diolah dan dikombinasikan untuk memperoleh sebuah kesimpulan untuk menjelaskan permasalahan yang ada di Desa. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen yang berisikan Profil Desa, Visi dan Misi,RKP, APBDes, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

[32] Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social Lainnya*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya ,2008), 180.
[33] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Garaha Ilmu, 2010), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Berikut pengelolahan data antara lain:[34]

a. Editing

Editing merupakankegiatan memeriksa dan menerjemahkan data yang diperoleh agar dapat mudah dipahami.Peneliti menggunakan tahap ini untuk proses pengecekan atau memeriksa kembali data-data yang sudah didapatkan. Data yang dicek peneliti diantaranya: Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Laporan Pertanggungjawban (LPJ) dan data lain yang terkait penyusunan laporan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

b. Organizing

Organizing merupakan proses menyusun data dari sumber dokumentasi sehingga dapat memperoleh gambaran sesuai dengan perumusan masalah penelitian dan dikelompokkan sesuai dengan variabel masing-masing.Peneliti menggunakan tahap ini untuk proses penyusunan dokumen-dokumen yang didapat supaya mempermudahuntuk menjawab rumusan masalah terkait akuntabilitas,

[34] M.Burhan Bungin, *Metode Penelitian Social & Ekonomi (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi Kebijakan Publik Komunikasi Manajemen dan Pemasaran)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tranparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*.

c. *Analyzing*

Analyzing merupakan proses memberikan analisis lanjutan terhadap hasil yang didapat dari proses *editing* dan *organizing* dengan menggunakan teori-teori yang sesuai dengan variabel penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan. Peneliti menggunakan tahap ini untuk menganalisis impelentasi akuntabilitas, tranparansi, partsipasi, efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*.Analisa peneliti diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca dan dapat dijadikan referensi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data. Kemudian dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dari memilih data yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan agar mudah difahami orang lain maupun diri sendiri.[35] Untuk menganalisis data yang diperoleh

[35]Luluk Fikri Zuriyah, *Metode Penelitian kualitatif*, (Surabaya : PT Revka Petra Media, 2012), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analisis, maka peneliti akan mengumpulkan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi serta saran bagi Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupeten Bojonegoro.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan mengenai bagian-bagian yang ada disetiap babnya untuk memberi kemudahan dalam pembahasan masalah serta permasalahan dapat dipahami secara sistematis. Dalam penelitian ini sistematika pembahasan ada 5 (lima) bab.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori secara menyuluruh dan terperinci yang membahas, yaitu: akuntabulitas, tranparansi, partisipasi, efektivias dan efisiensi, pengelolaan keuangan desa dan *good governance*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DATA PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian berupa gambaran umum objek yang diteliti, meliputi sejarah Desa Tejo, letak geografis Desa Tejo, visi dan misi Desa Tejo,struktur organisasi, logo lambang Desa Tejo, data yang terkait akuntabilitas, transparansi, partsipasi, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa pada Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupeten Bojonegoro.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan uraian tentang analisa mengenai implementasi dan kendala akuntabilitas, transparansi,partisipasi,efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan desa dalam pencapaan *good governance*.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban rumusan masalah tentang implementasi dan kendala akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*. Sedangkan saran berisikan tentang tindak lanjut penelitian kepada peneliti lain jika peneliti menemukan masalah baru yang perlu diteliti. Bagian akhir berisikan daftar pusaka dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, Akuntabilitas adalah suatu pewujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Setiap aparatur desa dituntut untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanan misinya. Setiap apartur desa dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan, moral, kebijakan,maupaun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.[36]

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikannya. Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.

2. Jenis–Jenis Akuntabilitas

Jenis-jenis akuntabilitas, yakni:

a. Akuntabilitas Politik.

Akuntabilitas politik adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah kepada publik.

[36]Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta:Andi Yogyakarta, 2004), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akuntabilitas Administrasi.

Akuntabilitas administrasi adalah suatu mekanisme atau instrumen untuk dapat menampung birokrasi dalam tanggungjawab administrasi pemeritah.[37]

Sheila Elwood mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas, yaitu:[38]

a. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu: akuntabilitas yang terkait dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumber dana publik.
b. Akuntabilitas proses, yaitu: akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas.
c. Akuntabilitas program, yaitu: akuntabilitas yang terkait dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik.
d. Akuntabilitas kebijakan, yaitu: akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap BPD dan masyarakat luas.

[37]Sjamsiar Indraradi, *Etika Birikrasi dan Akuntabilitas pemerintahan*, (Malang: Instrans Publishing, 2017), 41.
[38] Tatag Wiranto, *Akutabilitas konsep dan Tranparansi Dalam Pelayanan Publik*, (Jakarta: Badan Perencanaan pembangunan Nasional, 2009), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Indikator Akuntabilitas

Indikator untuk keberhasilan akuntabilitas, yakni:[39]

a. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan desa oleh penyeleggara pemerintahan desa.
b. Munculnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai kinerja pemerintah desa.
c. Berkurangnya kasus Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di dalam lingkup aparatur desa.

4. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP antara lain:[40]

a. Harus ada komitmen pemimpin dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
b. Harus ada sistem yang menjamin penggunaan sumber daya konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

[39] Loina lalolo Krina, *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Tranparansi dan Partispasi*, (Jakarta:Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), 17.
[40]Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, *Akuntabilitas Dan Good Governance Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, (Jakarta:LAN BPKP RI, 2000), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Harus berorientasi pencapaian visi misi dan inovatif sebagai alat perubahan manajemen instansi pemerintah dalam penyusunan laporan akuntabilitas.

B. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo, Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan dan lainnya kepada pihak yang membutuhkan informasi.[41] Transparansi yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah/akan diambil selama proses penyelenggaran pemerintahan negara, daerah dan desa.

b. Bentuk dan Tujuan Transparansi, yakni:

a. Transparansi Keuangan.

Transparansi keuangan adalah salah satu hal yang menjadikan hal sangat penting dilakukan disebuah institusi/lembaga politik karena keuangan merupakan sektor yang paling berkemungkinan besar akan terjadinya masalah. Transparansi keuangan dilakukan dengan tujuan:

- Menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.

[41]Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparnsi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,* (Bandung: : Alfabeta, 2014),109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang brekepentingan didalam sebuah institusi/lembaga politik.

b. Transparansi Manajemen.

Transparansi manajemen adalah transparansi untuk menjaga siklus kerja yang sehat didalam sebuah institusi/ lembaga publik yang memiliki tujuan, yakni:

- Mencegah terjadinya nepotisme.
- Meminimalisir adanya tenaga kerja yang tidak memiliki potensial didalam instutusi publik tersebut.

c. Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip-prinsip transparansi pemerintah meliputi 5 (lima) hal, yakni:[42]

a. Keterbukaan dalam rapat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan data atau dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
c. Keterbukaan prosedur yang berhubungan dalam pengambilan keputusan maupun prosedur penyusunan rencana.

[42]Mustofa Didjaja,*Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja*, (Jakarta: Lan dan Duta Pertiwi, 2003), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Keterbukaan register (informasi kegiatan pemerintahan) berisi fakta hukum.

e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat yaitu memberikan masyarakat kesempatan dalam mengemukakan pendapatnya terhadap kebijakan pemerintah.

d. Indikator Transparansi

Indikator transparansi sebagai berikut:[43]

a. Penyediaan dan akses informasi tentang program perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

c. Keterbukaan dalam proses pengelolaan.

d. Keterbukaan informasi tentang dokumen atau data pengelolaan dana desa tersebut.

C. Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa inggris "*partisipation*". Menurut Made Pidarta, Partisipasi adalah proses pengambilan peran atau pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan petanggungjawaban

[43]Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa partisipasi langsung dan tidak langsung melalui perwakilan masyarakat untuk pencapaian tujuan.[44]Sesuai Misi Desa Tejo "Menumbuhkankembangkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan desa dan pembinaan masyarakat pada umumnya, demi terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berkualitas". Partisipasi sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan pembangunan desa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa dan untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi sebagai dialog antara masyarakat setempat dengan para staf pemerintah desa guna memperoleh informasi mengenai kondisi pemerintahan desa tersebut.

b. Bentuk partsipasi

Berikut bentuk partisipasi masyarakat yaitu:[45]

a. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa.
b. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program sebagai tindak lanjut musyawarah rencana pembangunan desa.

[44]Sukardi, Akhmad, *Participatory Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Dearah*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2009), 23.
[45]Syahrul Syamsi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, (Jurnal ilmu Sosial dan Politik, Vol. 3, Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengontrol atau mengawasi penggunaan anggaran dana desa tersebut.

c. Manfaat Partisipasi

Manfaat partisipasi masyarakat adalah:[46]

a. Lebih memungkinkan pengambilan keputusan yang benar.
b. Melatih untuk bertanggungjawab serta mendorong untuk kepentigan bersama.
c. Memungkinkan untuk mengikuti setiap perubahan yang terjadi.
d. Mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi, inovasi serta membangun kepentingan bersama.
e. Mendorong kemampuan berpikir kreatif demi kepentingan bersama.

D. Efektivitas Dan Efisiensi

a. Pengertian Efektivitas dan Efisiensi

Pemerintah desa harus efektiv dan efisien dalam memproduksi output berupa kebijakan, aturan, dan pengelolaan keuangan desa. Menurut Abdurrahmat, Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Efisiensi adalah bertindak dengan cara menghasilkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak berlebihan.[47]Asas efektivitas dan efisiensi merupakan harapan pada setiap keputusan yang diambil

[46]Ibid
[47]Fachrul A Siregar, *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jurnal Ekonomi,Vol.2, Universitas Syiah Kuala, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat dan meminimalisasi penggunaan sumberdaya untuk pencapaian hasil kerja yang terbaik. Menganalisis Efektivitas dan efisiensi pembangunan desa sangat penting demi mencapai tujuan yang tepatdengan pengeluaran yang minimal.

b. Indikator Efektivitas dan Efisiensi

Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau seberapa besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Sedangkan efisiensi diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan sosial masyarakat. Semakin kecil biaya yang tercapai oleh pemerintah untuk kepentingan yang besar, maka pemerintahan tersebut dalam katagori pemeritahan yang efisien.[48]

E. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari 1 Januari sampai 31Desember.[49] Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

[48]Vera Sri Indah Cicilia, et.al,*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Dikabupaten Minahasa Utara*, (Jurnal Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, 2014)

[49]Didit Herlianto,*Manajemen Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Gosyen Publishng, 2017), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan pengelolaan keungan desa antara lain:

a. Perencanaan (penyusunan) APBDesa pendapatan dan belanja.
b. Pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber:
    1. Pendapatan asli desa.
    2. Swadaya masyarakat.
    3. Bantuan dari pemerintah atasan dan lain-lain.
c. Pembelanjaan atau lokasi.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keterpihakkan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah bersama Badan Permusyawaran Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut:[50]

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keungan Desa (PTPKD).
c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

b. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa tersebut dijelaskan:[51]

a. Proses perencanaan, meliputi:
   - Perencanaan program desa ini melibatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan musyawarah desa.
   - Perencanaan program mencangkup bidang pemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan.
   - Program berangkat dari aspirasi,kebutuhan, potensi dan masalah yang dihadapi masyarakat.

[50]Didit herlianto, *Manajemen Pembangunan Desa*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), 7.
[51]Ibid,.10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Perlu penentuan prioritas kebutuhan dalam perencanaan program.
- Program operasional bisa mencangkup pemerintahan, pelayanan,pembangunan dan kemasyarakatan.
- Menyusun sasaran atau hasil-hasil yang akan diprogram operasional desa.
- Merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dan rencana program tersebut.
- Merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

b. Proses Pelaksanaan, meliputi:

- Pemerintah desa bertanggungajawab melaksanakan program kegiatan.
- Pemerintah desa yang dibantu oleh dusun,RT,RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
- Pemerintah desa mengalokasikan dan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.
- Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
- Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga,dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Proses Penatausahaan, meliputi:

- Penatausahaan penerimaan desa.
- Penatausahaan belanja desa.
- Penatausahaan pembiayaan desa.
- Dokumen penatausahaan oleh bendahara desa.
- Laporan bendahara desa.
- Penatausahaan oleh pelaksana kegiatan.

d. Proses pelaporan,meliputi:

- Laporan kepada bupati/walikota.
- Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

e. Proses Pertanggungjawaban,meliputi:

Pada tahap ini kepala desa sebagai pemegang pengelolaan keuangan desa melaporkan laporan realisasi penggunaan dana desa yang disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksana APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

F. Good Governance

a. Pengertian *Good Governance*

Istilah *good governance* merupakan wacana baru dalam ilmu politik dan mulai berkembang di Negara Republik Indonesia sekitar 1990-an. Secara umum istilah *good governance* memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengendalikan, mengarahkan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan. *Good Governance* merupakan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan kebijakan untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan, terciptanya disiplin anggaran dan mendorong terwujudnya kondisi kesejahteraan serta integrasi hingga menjadi kesatuan dalam masyarakat.[52]

b. Prinsip - Prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip fundamental dalam *good governance*agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu: [53]

a. Akuntabilitas *(Accountability)*

Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawaban semua kebijakan, perbuatan, moral kepada masyarakat.

b. Transparansi (*Transparancy)*

Transparansi adalah kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi pihak yang membutuhkan informasi tersebut yakni masyarakat dan pemerintah diatasnya.

[52]Panji Santosa, Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance, (Jakarta: Prenada, 2008), 130.
[53]Rocman, *Good Governance:Prinsip, Komponen dan Penerapan*, (Jakarta:Komnas HAM, 2000) 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Partisipasi *(Participation)*

Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung atau melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Contohnya RT, RW, BPD atau lainnya.

d. Efektivitas dan Efisiensi *(Efectivennes dan Eficiency)*

Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Efisiensi adalah bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan.

e. Visi Strategis *(Strategic Vision)*

Pandangan-pandanan yang strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Keputusan yang diambil saat ini harus diperhitungkan beberapa tahun kedepan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

f. Kesetaraan *(Equity)*

Persamaan dalam pelayanan publik untuk bersikap adil dan berperilaku adil tanpa mengenal perbedaan,suku,keyakinan,jenis kelamin dan kelas sosial.

g. Berorientasi Pada Konsensus *(Consensus)*

Jika ada perbedaan kepentingan yang ada dimasyarakat penyelesaian pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Peduli Pada Masyarakat

Proses perencanaan pembangunan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah harus melibatkan kepentingan masyarakat kerana masyarakatlah yang akan menggunakan fasilitas tersebut.

i. Tegaknya Supremasi Hukum *(Rule Of law)*

Aturan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Desa Tejo adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Deso Tejo terdiri dari lima dusun, yakni Nero, Ndukoh, Njero, Tengah dan Kampung Baru. Desa Tejo memiliki luas wilayah kurang lebih 336, 80 ha terdiri dari tanah sawah 135,175 ha,tanah kering 28, 060 ha, tanah fasilitas umum 173,033 ha. Sedangkan jumlah penduduk Desa Tejo sebanyak 2073 yang tersebar dilima dusun yang terdiri dari 1035 laki-laki dan 1038 perempuan.[54]Penduduk di Desa Tejo memiliki berbagai bidang pekerjaan yang dibagi dari beberapa sektor yakni, sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa dan sebagainya. Tetapi mayoritas penduduk Desa Tejo adalah buruh tani dan mayoritas pendidikan masyarakat Desa Tejo tamat SD/sederajat.

Makanan khas Desa Tejo adalah sego samiri, nama samiri dicetuskan karena lauk dalamnya terdiri dari sambal dan teri. Sego samiri selalu ada setiap ada kegiatan didesa dengan berpiringkan daun pisang dan aroma sedapnya sambel teri.

[54]Profil Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Desa Tejo ditemukan sekitar 638 tahun yang lalu bersamaan dengan ditemukannya prasasti walandit yaitu prasasti pembentukan desa di Desa Wonokitri, Pasuruan daerah Tengger, Jawa Timur pada tahun 1381 Masehi. Nama Desa Tejo diambil dari nama orang yang pertama kali menemukan sumur di Desa Tejo yaitu Mbah Tejo. Istilah kata Tejo berasal dari bahasa arab *taajun* yang berarti Mahkota. Penduduk Desa Tejo yang memiliki karakter yangunggul atau ingin selalu diatas. Desa Tejo bangkit adalah sebuah desa yang sangat damai dan tetram dan memiliki jiwa gotong royong yang masih kental. Desa Tejo memiliki tanah yang subur sehingga mendukung kesejahteraan penduduk desa tersebut.[55]

3. Letak Geografis Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Desa Tejo beralamatkan di Jalan Pasinan di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Sesuai data yang diperoleh peneliti, Desa Tejo memiliki luas wilayah kurang lebih 336,808 ha. Memiliki rata-rata harian suhu23-36º C dan kelembapan 44%.

Adapun batas-batas wilayah Desa Tejo sebagai berikut:

a) Sebelah utara : Desa Simbatan
b) Sebelah selatan : Desa Sumuragung
c) Sebelah Timur : Desa Pesen

[55] Moch.Qomarudin,*wawancara*, Kepala Desa Tejo, 15 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Sebelah Barat : Desa Cangaan

4. Visi dan Misi Desa Tejo Kecamatan Knaor Kabupaten Bojonegoro

Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro mempunyai visi dan misi yang digunakan sebagai acuan dalam mencapai tujuan dan target desa secara bertahap dan berkesinambungan.

Adapun visi dan misi Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

a. Visi

"Menjadikan Desa Tejo Bangkit Menuju Bojonegoro Matoh"

b. Misi

1. Mewujudkan dan mengambangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan,organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan dan polatanam yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menata Pemerintahan Desa Tejo yang kompak dan bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
8. Meningkatkan potensi ekonomi masyarakat.
9. Menumbuhkembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk menfasilitasi kebutuhan petani.
10. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
11. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif, dan enterpreneur (wirausahawan).
12. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk mengembangkan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengelolan hasilnya.
13. Menumbuhkankembangkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan desa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembinaan masyarakat pada umumnya, demi terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berkualitas.

5. **Struktur Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro**

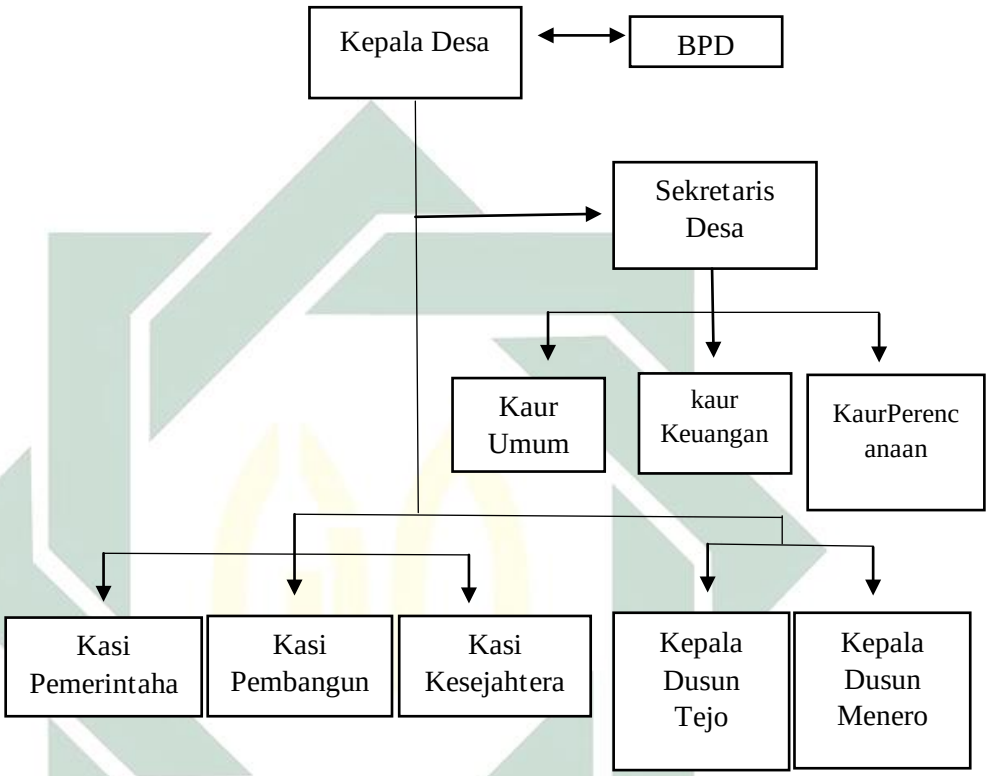

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Desa

Keterangan:

Kepala Desa	: Moch. Qomaruddin
Sekretaris Desa	: Akhmad Rizal
Kaur Perencanaan	: Siti Mahmudah
Kaur Keuangan	: Hariyadi
Kaur TU Dan Umum	: Zurnia Anni Z.Z
Kasi Pemerintahan	: Muslikah
Kasi Kesejahteraan	: Masngut
Kasi Pelayanan	: Moch. Suntarip
Kepala Dusun Menero	: Dwi Wahyu Andi S.
Kepala Dusun Tejo	: Hasan, MD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua BPD	: Zainudin
Wakil Ketua BPD	: Bisnan
Sekretaris BPD	: Muksin
Anggota BPD	: Eko Pambudi
Anggota BPD	: Muh. Toyib.A

6. **Logo Lambang Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro**

Gambar 3. 2 Logo Lambang Desa Tejo

Keterangan:

- Logo lambang desa berbentuk perisai bersegi lima, menggambarkan bahwa masyarakat Desa Tejo sanggup mempertahankan cita-cita Bangsa Indonesia dan melanjutkan pembangunan serta memajukan desa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Tulisan Desa Tejo dengan huruf Kuning dan dasar merah putih makna bahwa keberadaan dan terbentuknya Desa Tejo adalah nuansa persatuan dan kesatuan, semangat kebersamaan serta kehormatan terhadap Sang Saka Merah Putih sebagai Lambang Kedaulatan Republik Indonesia.
- Padi dan kapas bermakna padi melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan tidak terpisahkan. Padi dan kapas juga memberi gambaran bahwa Desa Tejo memiliki tujuan pelaksana kebijakan pemerintahan dilakukan atas dasar kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.
- Bintang 5 (lima) emas melambangkan 5 dusun yaitu Nero, Njero, Tengah, Ndukoh dan Kampung Baru yang bersinar dan maju.
- Pelangi melambangkan masyarakat Desa Tejo yang beragam baik agama, budaya, tingkatan sosialnya.
- Tulisan Kinasih mempunyai arti Kreatif, Inovatif, Aman, Bahagia, Sehat, Indah dan Harmonidengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat yang maju dalam segala bidang, baik pada bidang pertanian, pertanian, perikanan, home industria, usaha ekonomi kreatif, dan bidang lainnya, sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkebunan, peternakan,pertukaran dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

- Mahkota adalah lambang bagi kekuasaan, legitimasi, keabadian, kejayaan, kemakmuran, dan kehidupan serta bermakna arti kata Tejo itu sendiri.

Lambang desa berkedudukan sebagai tanda identitas desa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etika hukum yang ada pada masyarakat Desa Tejo, diyakini keberadaannya dan dapat memberikan motivasi untuk menjaga martabat dari perbuatan tercela.

7. **Implementasi ATPEEPada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro**

Undang-Undang Bab 5 Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 tentang indikator pelaksanaan penyelenggara pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa yakni; akuntabilitas, transparansi, partsipasi, efektivitas dan efisiensi.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah desa atas penyelenggaran pemerintahan terkait pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat dan pemerintah diatasnya. Transparansi adalah prinsip untuk menjamin kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan terutama pengelolaan keuangan desa. Partisipasi adalah keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan desa dan juga pengelolaan keuangan desa. Efektivitas adalah pencapian hasil program dengan target yang telah ditetukan. Efisiensi adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sumberdaya yang tidak berlebihan.

Proses pengelolaan keuangan Desa Tejo dimulai dengan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya kepala desa melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yakni penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Zurnia salah satu perangkat Desa Tejo, beliau mengatakan bahwa:

"Hitam putihnya desa tergantung pada kepala desa, pembangunan Desa Tejo bisa semaju ini karena kepala desa yang bisa menggunakan peluang dengan sebaik baiknya"[56]

Dalam wawancara ini kepala desa sangat berpengaruh terhadap kemajuan desanya. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kretivitas dalam pelaksanaan seluruh prinsip *good governance* sebagai unsur penyelenggara negara, baik pemerintah pusat dan daerah atau kota. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemerintah dalam mengelola keuangan desanya ditentukan oleh seberapa besar prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik *(good governance)*tersebut diimplementasikan secara maksimal.

[56]Zurnia Anni, *wawancara,*Kaur TU dan Umum Desa Tejo, 23 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks desa, pemerintahan desa yang baik harus mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi yang merupakan prinsip *good governance* untuk mencapai suatu kepemerintahan desa dalam mengelola keunagan yang baik dan kualitas pelayanan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 meliputi Perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa harus mengikuti prinsip-prinsip yaitu: Akuntabilitas, Tranparansi, Partisipasi, Efektivitas dan Efisiensi. Dari hasil pengamatan dan wawancara, dokumentasi dilakukan oleh peneliti di desa tersebut. Berikut implementasi dan kendala prinsip-prinsip *good governance*atau tata kelola pemerintahan yang baik yaitu:

1. **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.**

Akuntabilitas merupakan pemerintah desa harus mengelola keuangan sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Namun pada tahap penatausahaan, proses ini dipegang oleh kaur perencanaan. Berikut ini hasil wawancara dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaur Keuangan yang bernama Hariyadi terkait proses pengelolaan keuangan Desa Tejo.

"Pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tidak semua masyarakat mengetahui pengelolaan keuangan desa namun penyelenggaraan pemerintahan Desa Tejo menyediakan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut". [57]

Permendagri pasal 113 Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan "Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai Pelaksana yaitu Fungsi Kebendaharaan. Dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum". Berikut wawancara kepada Siti Mahmudah sebagai kaur perencanaan Desa Tejo terkait penatausahaan :

"Dalam proses penatausahaan kaur perencanaan membutuhkan nota-nota pembelian, kuitansi dan lainnya untuk dijadikan bahan pertanggungajawaban pelaporan keuangan desa nanti dan semua yang mengerjalan laporan keuangan adalah saya karena faktor usia dan kurangnya wawasan penatausahaan kaur keuangan". [58]

Dalam proses penatausahaan keuangan Desa Tejo dilakukan kaur perencanaan karena kurangnya pengetahuan dan wawasan bendahara desa terkait penatausahaan mengakibatkan pelaporan Laporan Pertanggungjawban (LPJ) tidak dapat disampaikan secara tepat waktu. Dalam proses penatausahaan di Desa Tejo ini sudah menganut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Karena pada tahun sebelumnya masih menganut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

[57]Hariyadi, *wawancara*,Kaur Keuangan Desa Tejo, 23 September 2019.
[58]Siti Mahmudah, *wawancara*, Kaur Perencanaan Desa Tejo, 23 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain kepada pemerintah desa peneliti juga mewawancarai kepada masyarakat setempat sebagai bahan penilaian atau pertimbangan masyarakat desa tentang kinerja pemerintah desa tentang akuntabilitas. Masyarakat Desa Tejo tersebut dalam proses akuntabilitas tidak tahu, karena tahap ini sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa, bahkan masyarakat tidak tahu apa itu akuntabilitas. Berikut ini wawancara kepada Bapak K.Mudzakrir selaku tokoh agama di Desa Tejo.

"Saya tidak tahu apa itu akuntabilitas mbak Dwi, yang saya tahu semua pelaporan keuangan desa dikerjakan oleh pemerintah desa"[59]

Oleh karena itu, dari hasil wawancara tersebut, menurut pengamatan peneliti, akuntabilitas tidak terlalu penting bagi masyarakat desa. Apabila kepala desa sudah menjalankan fungsi sosialnya secara baik, maka tidak perlu mempertanggungjawabkan kegaitan, program dan keuangannya, meskipun akuntabilitas merupakan masalah yang sangat penting sebagai bukti administratif berhasil atau tidaknya kepala desa menjalankan amanahnya.

2. **Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro**

Transparansi merupakan keterbukaan kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa termasuk program pembangunan. Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Pemeritah memiliki kewanangan mengambil berbagai keputusan yang berdampak

[59]Mudzakir, *wawancara*, Tokoh Agama Desa Tejo, 23 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai kegiatan pemerintahan desa. berikut ini wawancara sekretaris desa terkait dengan proses transparansi:

"Belum adanya papan informasi yang menginformasikan keluar masuknya anggaran mbak, namun sudah rencana akan dibuatkannya papan informasi mbak. Terkait web desa, dulu pernah dibuatnya web desa yang menginformasikan kegiatan pemerintahan desa, namun sekarang sudah tidak difungsikan web desa tersebut. InsyaAllah akan dibuatkan web desa baru baru lagi".[60]

Dengan transparansi, kebohongan sulit disembunyikan. Dengan adanya transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelematakan uang rakyar dari korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

3. Partisipasi Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Mekanisme kontrol yang dilakukan tanpa perlu menunggu suatu penyelewengan atau kesalahan terjadi. Berikut ini hasil dari wawancara dari salah satu BPD Desa Tejo yaitu Zainudin menyatakan bahwa:

"Sebagai elemen tata pemerintahan Desa Tejo menurut saya, warga masyarakat kurang terlibat dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan keputusan warga hanya mempercayai kepada perwakilannya sehingga warga ada yang tidak tahu apa yang telah dirumuskan".[61]

[60] Ahmad Rizal, *wawancara*, Sekretaris Desa Tejo, 23 Sepetember 2019.
[61] Zaindin, *wawancara*,Ketua BPD Desa Tejo, 23 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa warga masyarakat kurang mengetahui arti yang sesungguhnya dalam berpartisipasi. Kurangnya sosialisasi dari penyelengara pemerintah desa mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham program dana desa tersebut. Sehingga kepentingan masyarakat kurang terpenuhi dikarenakan masyarakat kurang berpartisipatif. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu warga Desa Tejo, Muhammad Khoirul Anam bahwa:

"Masyarakat Desa Tejo kurang perpastisipatif dalam kehdiupan sehari-hari yang berurusan dalam pengelolaan keuangan desa, warga masyarakat Tejo tidak mempunyai power atau keberanian dalam menyampaikan unek-uneknya (aspirasi) secara nyata, cuma sebatas ngomong(mengeluh) sesama warganya saja"[62]

Partisipasi dalam hal ini, bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan Badan Perwakilan Rakyat (BPD), tetapi juga dalam kehidupan sehar-hari terutama berurusan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga akan melahirkan kontrol dalam masyarakat terhadap jalannya pemerintahan Desa Tejo dan mempersempit ruang gerak pemerintah Desa Tejo dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan.

4. Efektivitas dan Efisiensi Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu yang telah tercapai). Efisiensi merupakan kemampuan suatu organisasi untuk mencapai

[62]Khoirul Anam, *wawanacra*, Masyarakat Desa Tejo, 24 Sepetember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

target yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Berdasarkan Peraturan Desa Tejo Nomor 05 Tahun 2014 tentang RPJMDesa Tejo Pada Tahun 2018 masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah sarana prasarana, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya, koperasi dan usaha masyarakat, pemerintahan, lingkungan hidup, pertanian, peternakan dan pengairan. Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa, kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya. Berikut ini wawancara kepada kepala Desa Tejo, Bapak Qomarudin yakni:

"Prioritas kebijakan pembangunan Desa Tejo, menekankan pada diprioritaskan bagaimana desa secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui oprimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat" [63]

Berdasarkan prioritas masalah dalam pembangunan Desa Tejo dalam 6 (Enam) tahun ini adalah:

a. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang ada di desa meliputi peningkatan kwalitas jalan, jembatan, prasarana penerangan jalan dan fasilitas umum sesuai kebutuhan.
b. Peningkatan kualitas usaha masyarakat melalui peguatan kelembagaan petani, perajin, pengembangan askes pemasaran dan penigkatan mutu olahan hasil panen.

[63]Moch Qomarudin, *wawancara,*Kepala Desa Tejo, 23 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengembangan fasilitas sosial terutama di bidang pendidikan, kesahatan dan keagamaan.

d. Peningkatan peran dalam pemerintahan desa, lembaga sosial kemasyarakatan, karang taruna, kelompok perempuan, dalam proses pembangunan desa.

Selain kepada pemerintah desa tersebut, peneliti juga mewawancarai kepada warga setempat sebagai bahan pertimbangan tentang efektivitas dan efisiensi program pembangunan Desa Tejo, yakni: Bapak Sukairi.

"Pembangunan insfrastruktur sarana dan prasana Desa Tejo sudah bagus, namun pelayanan kebutuhan terkait pertanian perlu ditingkatkan, semisal terkait perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan didukung oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)".[64]

Pernyataan dari warga desa lainnya, Bapak Roekan selaku ketua RT 06 RW 01 Desa Tejo, yakni:

"Terkait Pembangunan di Desa Tejo sudah maju, namun juga ada pembangunan yang dibangun namun tidak dimanfaatkan, semisal lumbung padi, tempat lahan tidur yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk tanaman palawijo, sayuran dan tanaman produktif lainnya"[65]

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa tersebut. Pelaksanaan pembangunan di Desa Tejo dirasakan kurang efektif dan efisien dikarenakan kapasitas dan kompetensi pemerintah desa dan terlibatnya peran serta warga secara aktif dalam pengelolaan keuangan desa.

[64]Sukairi, *wawancara*, Masyarakat Desa Tejo, 24 September 2019.
[65]Roekan, *wawancara*,Ketua RT 06 RW 01 Desa Tejo, 24 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini gambaran pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro: Pengelolaan Keuangan Desa Tejo diprioritaskan untuk pembangunan insfrastruktur sarana prasarana desa yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan pembangunan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil atau makro. Seperti halnya dikatakan oleh Kepala Desa Tejo:

"Penggunaan Dana Desa Tejo ini kita hanya gunakan, yang pertama untuk pembangunan insfratruktur sarana prasarana desa, semisal: peningkatan kualitas jalan poros desa, prasarana penerangan jalan, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) jalan poros, rehabilitasi jembatan desa, dan revitalisasi kantor pemerintah desa. Yang kedua peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat,semisal: pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengoptimalkan potensi pertanian, peningkatan SDM dan pelayanan masyarakat. Yang ketiga yakni peningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan mikro, semisal: peningkatan manajemen bagi usaha kecil menengah dan kelompok belajar usaha dengan memberikan bantuan dalam penyewaan toko atau lapak kepada masyarakat yang belum mempunyai tempat untuk berdagang atau mengembangkan usahanya"[66]

Pengelolaan keuangan dilakukan dengan lima tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan di Desa Tejo dilakukan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangsdes) dengan melibatkan seluruh pemeritah desa, Badan Permusyawaran Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga

[66] Moch Qomarudin, *wawancara*, Kepala Desa Tejo, 23 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(RW), Rukun Tetangga (RT) dan Tokoh-tokoh masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dipimpin oleh kepala desa tersebut. Aparatur desa sudah membuat rancangan untuk anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam Musrenbangdes, pemerintah desa meminta pendapat masyarakat terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi desa dan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi. Perencanaan desa harus mempunyai perencanaan yang matang yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selesai Musrenbangdes dan mendapatkan kesepakatan dan mencapai mufakat maka dibentuklah Tim Pelaksana (Timlak) untuk setiap program.

Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan yang tercantum dalam Profil Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

- **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tejo**

Tabel 3. 1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Kegiatan Partisipasi	**Jumlah Partisipasi**
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	3 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali msuyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa	60%
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbangdes	20%
Penggunaan Profil Desa sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dam forum Musrenbang Partisipatif	Ya/~~Tidak~~

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan Partisipasi	Jumlah Partisipasi
Penggunaan Dara BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbangdes di desa	Ya/~~Tidak~~
Pelibatan masyarakat dalam pemuttakhir data profil desa sebagai bahan dalam Musrenbangdes Partsipatif	Ya/~~Tidak~~
Usulan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan dimuat dala RAPB-Desa	90%
Usulan Masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa	40%
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/pronvinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbangdes dan disetujui untuk melaksanakan di desa oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.	10%
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD)	Ada/~~Tidak~~
Pemilikan dokumen Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)	Ada/~~Tidak~~
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa tang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Pronvinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang dinvestasi di desa	Ada/~~Tidak~~

- **Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan**

Tabel 3. 2 Pelaksanaan Dalam Pengelolaaan Keuangan Desa

Kegiatan Partisipasi	Jumlah Partisipasi
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa sesuai hasil Musrenbangdes	50%
Penyelenggaraan musyawarah desa untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada	Ada/~~Tidak~~

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan Partisipasi	Jumlah Partisipasi
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya	Ada/~~Tidak~~

- Berikut ini Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018

Tabel 3.3 Pertanggungjawaban APBDesa Tejo Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sumber Dana
1	**Pendapatan**			PAD
1,1	Pendapatan Asli Desa	489.850.000	489.850.000	PAD
1.1.1	Hasil Aset	400.850.000	400.850.000	PAD
	• Bengkok Kades dan Perangkat Desa	288.750.000	288.750.000	PAD
	• TKD/Tanah Celengan disewakan	112.100.000	112.100.000	PAD
1.1.2	Hasil Usaha Desa	75.000.000	75.000.000	PAD
	• Bangunan desa	70.000.000	70.000.000	PAD
	• Bagi hasil usaha BUMDESa	5000.000	5000.000	PAD
1.1.4	Gotong royong	14.000.000	14.000.000	PAD
1,2	Pendapatan transfer	1.360.776.500	1.360.776.500	
1.2.1	Dana Desa	691.937.300	691.937.300	DD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sumber Dana
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retrubusi daerah	20.364.000	20.364.000	PBH
	• Bagi Hasil Pajak	15.890.800	15.890.800	BHP
	• Bagi Hasil Retribusi	4.473.200	4.473.200	BHP
1.2.3	Alokasi Dana Desa	439.175.200	439.175.200	ADD
1.2.4	Bantuan Keuangan	209.300.000	209.300.000	
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten/Kota	209.300.000	209.300.000	PBK
	• Bantuan keuangan DAK Pendidikan	139.300.000	139.300.000	PBK
	• Bantuan Keuangan Desa	70.000.000	70.000.000	BPK
	Jumlah Pendapatan	**1.850.626.500**	**1.850.626.500**	
2	**Belanja**			
2,1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	641.695.200	641.695.200	
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	432.210.000	432.210.000	
2.1.1.1	Belanja Pegawai	432.210.000	432.210.000	ADD, PAD
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	138.000.000	138.000.000	ADD
2.1.1.1.2	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	129.210.000	129.210.000	ADD
2.1.1.1.3	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	165.000.000	165.000.000	PAD
2.1.2	Operasional Perkantoran	19.185.200	19.185.200	ADD, PAD
2.1.2.2	Belanja barang dan jasa	19.185.200	19.185.200	ADD, PAD
2.1.3	Operasioanal BPD	27.900.000	27.900.000	PAD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sumber Dana
2.1.4	Operasional RT/RW	32.000.000	32.000.000	PAD, ADD
2.1.5	Musrenbangdes	3000.0000	3000.0000	PAD
2.1.7	Penyelenggaraan RPJMDesa	1000.000	1000.000	PAD
2.1.8	Penyelenggaraan PHBN-RI	20.000.000	20.000.000	PAD
2.1.10	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	3000.000	3000.000	PAD
2.1.12	Fasilitasi Kegiatan PHBD	10.000.000	10.000.000	PAD
2.1.14	Kegiatan Intensifikasi PBB	2.170.000	2.170.000	PAD
2.1.15	Kegiatan penyelengaraan Desa	54.230.000	54.230.000	PAD
2,2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa belanja modal	793.541.300	793.541.300	
2.2.3	Belanja Modal Pembangunan Jalan Paving	176.700.000	176.700.000	
2.2.3.1	Pembangunan Jalan Paving Dusun Menero Rt 01 Rw 01	40.000.000	40.000.000	
2.3.2	Pembangunan Jalan Paving Dusun Menero Rt 02 Rw 01	47.000.000	47.000.000	DD
2.2.3.3	Pembangunan Jalan Paving Dusun Menero Rt 04 Rw 01	30.000.000	30.000.000	DD
2.2.3.4	Pembangunan Jalan Paving dusun Menero Rt 05 Rw 01	15.500.000	15.500.000	DD
2.2.3.5	Pembangunan Jalan Paving Dusun Menero Rt 07 Rw 01	7.500.000	7.500.000	DD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sumber Dana
2.2.3.6	Pembangunan Jalan Paving Dusun Tejo Rt 03 Rw 02	11.500.000	11.500.000	DD
2.2.3.7	Pembangunan Jalan Paving Dusun Tejo Rt 01 Rw 02	20.000.000	20.000.000	DD
2.2.3.8	Pembangunan Depan Kantor BUM DES Dusun Tejo Rt 02	5.200.000	5.200.000	PAD
2.2.4	Pembangunan Jalan Cor/Beton	109.500.000	109.500.000	DD
2.2.6	Pembangunan Jarungan Usaha Tani	50.000.000	50.000.000	DD
2.2.7	Pembangunan Sanitasi Lingkungan	94.000.000	94.000.000	DD
2.2.7.2	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Menero Rt 05	94.000.000	94.000.000	DD
2.2.8	Pembangunan Gedung TPQ/MASJID	30.000.000	30.000.000	PAD
2.2.10	Penanggulangan Sarang Nyamuk	7.040.000	7.040.000	ADD
2.2.11	Pembangunan Pagar Kantor BUMDES	33.000.000	33.000.000	ADD PAD
2.2.15	Pengembangan Sistem Informasi Desa	4000.000	4000.000	PAD
2.2.16	Pembangunan Gorong-gorong	26.937.300	26.937.300	DD
2.2.16	Rehab Drainase	25.000.000	25.000.000	ADD
2.2.21	Pengurukan Jalan (Padelisasi)	12.000.000	12.000.000	DD
2.2.25	Belanja Modal Pembangunan Pasar/Kios Desa	150.000.000	150.000.000	DD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sumber Dana
2.2.26	Belanja Modal Pembangunan Tanaman	20.364.000	20.364.000	BHP. BHR
2.2.27	Belanja Modal Pembangunan Mushola dan WC Umum	55.000.000	55.000.000	PAD
2,3	Bidang Pelaksanaan Pembinaan	161.970.000	161.970.000	
2.3.1	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	18.595.000	18.595.000	ADD, PAD
2.3.2	Pembinaan dan Penyuluhan Pasanagn Usia	4.075.000	4.075.000	ADD, PAD
2.3.5	Kegiatan Wajib Belajar	139.300.000	139.300.000	
2,4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	253.420.000	253.420.000	
2.4.2	Pelayanan Paud dan TPQ	28.500.000	28.500.000	DD, PAD
2.4.3	Pelayanan Posyandu dan Kegiatan Pos Gizi	21.040.000	21.040.000	DD, PAD
2.4.4	Kegiatan PKK/ Kelompok Perempuan	53.880.000	53.880.000	PAD, ADD
2.4.11	Pengembangan Usaha BUMDESA	150.000.000	150.000.000	DD, PBK, PAD
	Jumlah belanja	**1.850.626.500**	**1.850.626.500**	

Setiap tahun dana desa yang diterima oleh Desa Tejo tidaklah sama, tetapi hampir setiap tahun meningkat jumlahnya dan membantu mencukupi anggaran dana di Desa Tejo. Sebanyak kurang lebih 70% dana ABPDesa digunanakan untuk mendanai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan,pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sisanya 30% dana APBdesa bisa digunakan sebagai dana operasional pemerintah desa dan tunjangan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- Program Daerah dan Program Sektoral Yang Masuk DesaTejoTahun 2018

Tabel 3. 3 Program Sektoral Tahun 2018

NO	Jenis Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jumlah
1	Pembangunan saluran air	RW 02 RT 06	APBD Tahun 2018	250.000.000
2	Pembangunan perpustakaan SDN Tejo	RW 02 RT 05	APBD Tahun 2018	150.000.000
3	Pembangunan pagar perpustakaan	RW 02 RW 05	APBD Tahun 2018	50.000.000
4	Pembangunan saluran air	RW 01 RT 07	APBD Tahun 2018	2000.000.000
JUMLAH				**2.450.000.000**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Implementasi Dan Kendala ATPEE Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian*Good Governance*

Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah menggunakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yakni prinsip supremasi hukum *(Rule Of law)*menjadi salah satu dari komponen dalam*good governance*. Menurut Undang-Undang BAB 5 pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ada 5 (lima) yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi.

Pemerintah Desa Tejo dalam mengelola keuangan desa tidak hanya menganut prinsip Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, namun Pemerintah Desa Tejo juga menganut Peraturan Bupati (Perbub) Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendoman Pelaksanaan Dana Desa. Tahap pengalokasian dana desa dilakukan dengan mempertimbangkan aspek luas wilayah, jumlah penduduk, letak geografis dan angka kemiskinan desa agar mewujudkan pembangunan desa secara merata. Untuk proses pengelolaan keuangan desa dimulai perencanaan program dan anggaran yang akan digunakan setiap kegiatan. Perencanaan dilakukan dengan musyawarah bersama dengan melibatkan lembaga yang berkepentingan dan masyarakat Desa Tejo dalam pengambilan keputusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah perangkat desa melaksanakan musyawarah maka dibentuklaTim Pelaksana (Timlak) untuk masing-masing kegiatan yang melibatkan kepentigan masyarakat dalam pembangunan tersebut. Tim pelaksana berfungsi melaksanakan semua kegiatan yang telah disepakati saat musyawarah. Setelah itu tim pelaksana membuat laporan anggaran biaya yang akan dilaporkan oleh kaur keuangan desa. Kaur keuangan membuat setiap laporan yang akan dilaporkan ke kepala desa, namun didesa ini yang membuat semua laporan adalah kaur perencanaan. Kaur perencanaan melaporkan laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa kepada kepala desa selama tahun bersangkutan. Dan selain itu, juga melaporkan kepada bupati dan masyarakat Desa Tejo untuk pertanggungjawaban semua pendapatan dan pengeluaran yang telah dilakukan. Berikut ini implementasi ATPEE pada pengelolaan Desa Tejo,yaitu:

1. **Perencanaan Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Govenance***

   Dalam tahap ini, proses perencanaan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, kegiatan, program kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, maka desa diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka waktu 6 (enam) tahun dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten.[67]

Manfaat penyusunan RKP desa sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa, pemberi jalan kegiatan pembangunan tahunan di desa, menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan desa.[68]Adapun kebutuhan masyarakat desa meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaaatan teknologi tepat sasaran demi kemajuan ekonomi, peningkatan kualitias dan ketentaraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Prinsip partisipasi di Pemerintahan Desa Tejo sudah diimlementasikan, hal itu dibuktikan adanya jumlah kehadiranperan serta masyarakat dalam Musrenbangdes yang dicantumkan di profil Desa Tejo.Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan dilaksanakan 3 kali. Dan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali msuyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa 60% yang terdiri 40% laki-laki dan 20% perempuan.

[67]Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanan Pembangunan Desa
[68]Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil wawancara dengan BPD,ditemukan bahwa masyarakat kurang terlibat dalam pengambilan keputusan, masyarakat tidak mempunyai *power* atau keberanian untuk menyampaikan pendapatnya, mereka hanya berani bicara dan mengeluh kesesama warganya. Mereka menyerahkan kepada pemerintah desa terkait program yang akan diambil. Lemahnya partsipasi juga merupakan masalah yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat Desa Tejo tidak mempunyai keberanian dalam meyampaikan aspirasi atau pendapatnya.

Kontrol masyarakat Desa Tejo serta fungsi *checks and balance* masih lemah. Sehingga kurangnya partisipasi warga pemerintah desa kekurangan informasi atau petunjuk atas kebutuhan dan keinginan warganya. Tanpa partisipasi warga berdampak investasi yang ditanamkan di desa tersebut tidak mengungkapkan kebutuhan warganya dan sumber daya publik atau fasilitas publik tidak digunakan secara optimal. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa Tejo mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut.

2. Pelaksanaan Pada Pengelolaan Keuangan Desa TejoKecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance*

Pemerintah desa khususnya kepala desa mempunyai tanggungjawab kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa. prinsip ini diantaranya bahwa penerimaan dan pengeluaran desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan melalui rekening kas desa. pencairan dana desa ditandatangani oleh Bendahara Desa Tejo dan Kepala Desa Tejo.Dengan mengimplementasikan program-program yang telah dijalankan,Pelaksanaan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penangulangan kemiskinan melalui pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya publik secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan gotong royong, pelaksanakan pembangunan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya alam desa dan memanfaatkan potensi desa. Menurut data diatas terdapat 4 (empat) program sektoral dari pemerintah daerah, pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dilakukan evaluasi melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat pada RKP Desa dan APBDesa tahun sebelumnya. Hasil Musrenbangdes tahun 2018 meliputi: Bidang sarana prasarana, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, koperasi dan usaha masyarakat, pemerintahan, lingkungan hidup,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian, peternakan dan pengairan. Sedangkan bidang yang terealisasi, yakni: Pertanian, peternakan dan pengairan.

Sedangkan kegiatan yang dibiayai dari APBDesa meliputi pengerasan jalan poros desa, pengerasan jalan lingkungan, pembuatan TPT, Rehab mushola, Pemeliharaan saluran drainase dan pemeliharaan balai dan kantor desa. Adapun pembangunan ekonomi meliputi Bantuan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (PNMPM-MP) dan Bantuan Program Usaha Ekonomi Produktif (PNPM-MP).

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya dilaksanakan oleh desa, kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan sumber daya yang ada di lapangan. prioritas kebijakan pembanguna Desa Tejo, menekankan pada diprioritaskan bagaimana desa secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pengelolaan keuangan Desa Tejo dirasa kurang efektiv dan efisien, hal ini dilihat dari banyaknya rencana pembangunan pada RKP desa tapi masih ada yang belum terealisasikan secara keseluruhan dan terdapat pembangunan yang tidak berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat desa. Hal ini dikarenakan masih terdapat bangunan yang dibangun namun tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan semisal lumbung padi, tempat pembibitan buah dan sayuran, tempat pembibitan ternak dan lain sebagainya.

3. **Penatausahaan Pada Pengelolaan Keuangan Desa TejoKecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance***

Pada tahap penatausahaan, terkait dengan kegiatan pencatatan oleh kaur keuangan desa, alat yang digunanakan untuk membantu kaur perencanaan berupa buku kas umum, buku bank, buku kas pembantu pajak.[69]Dari hasil wawancara dengan kaur perencanaan bernama Siti Mahmudah, setelah proses pelaksanaan kegiatan, sekretaris desa bekerja sama dengan kaur perencanaan untuk proses penatausahaan. Proses penatausahaan dilakukan oleh kaur perencanaan karena kurangnya pengetahuan dan wawasan kaur keuangan terkait penatausahaan. Kaur perencanaan melakukan proses penatausahaan terhadap proses pengelolaan keuangan desa yang mana harus membuat laporan terkait penggunaan anggaran beserta bukti administrasi seperti nota pembelian.

Dalam hal ini kaur keuangan tidak berperan banyak, hanya membantu pencairan dana dari pemerintah pusat. Jadi pada tahap ini prinsip akuntabilitas sudah diimplementasikan, hal ini dilihat dari adanya proses penatausahaan yakni adanya laporan realisasi anggaran. Namun laporan tersebut tidak disampaikan secara tepat waktu, proses

[69]Didit Herlianto, *Manajemen Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Gosyen Publising , 2017), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatatan pada penatausahaan dilakukan terkadang tidak tepat pada tanggal saat transaksi karenapembuatan laporan oleh kaur perencanaan dilakukan saat mau mendekati akhir bulan.

4. Pelaporan Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian*Good Governance*

Pada tahap pelaporan, kepala desa mempunyai kewajiban menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tejo kepada Bupati Bojonegoro berupa laporan semesteran dan tahunan. Dari hasil wawancara diatas, proses penausahaan yang dilakukan oleh kaur perencanaan karena kurangnya pengetahuan dan wawasan bendahara desa mengakibatkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan pertanggungjawaban tidak dapat disampaikan tepat waktu.

Laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban dilengkapi dengan buku pembantu seperti buku bank, buku kas pembantu pajak dan buku kas umum. Laporan tersebut dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan, namun jika laporan tersebut dilaporkan secara terlambat maka berakibat pada keterlambatan pencairan dana desa tahap selanjutnya, sehingga tidak bisa berjalan dengan lancar.

5.* Pertanggungjawaban Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance

Dalam tahap pertanggungjawaban, kepala desa mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati dan masyarakat setiap satu tahun anggaran.Pada proses ini, kepala desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertanggungajwabkan kepada pihak kecamatan, BPD dan masyarakat Desa Tejo. Hasil wawancara salah satu anggota BPD, rapat pertanggjawaban kepada BPD yang dihadiri oleh kepala desa dan perangkat desa yang membahas peraturan desa tentang realisasi petanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018. Hasil rapat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa semua anggota BPD telah menyetujui tentang peraturan Desa Tejo tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (APBDesa) tahun 2018. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Tejo Tahun 2018 sejumlah Rp.1.859.645.600.[70]

Prinsip transaparansi sudah terimplementasikan namun belum dilakukan secara maksimal, beberapa pos tertentu dalam laporan hanya diketahui oleh pemerintah desa, hal itu terlihat dari wawancara kepada sekretaris desa, belum adanya papan informasi yang menginformasikan keluar masuknya anggaran dan web desa yang menginformasikan program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan oleh pemerintah desa, yaitu terjadinya praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Hal ini menumbuhkan pikiran negatif dan kurangnya kepercayaan masyarakat atas amanat yang telah diberikan kepada pemerintah desa.

[70]Bisnan, *wawancara*, BPD Desa Tejo, 1 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini kurangnya bimbingan maupun pendampingan dari Pemeerintah Daerah yakni Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bagi penyelenggara pemerintahan Desa Tejo dalam penyusunan pengelolaan keuangan desa. Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Peemerintah Desa, Perempuan dan keluarga Berencana (BPMPDPKB) Bojonegoro dalam membina desa cenderung bersikap pasif untuk menunggu desa berkonsultasi menyangkut pengelolaan keuangan desa.[71] Peranan BPMPDPKB Kabupaten Bojonegoro selaku pembina pengelolaan keuangan desa harus menjalankan bimbingan, konsultasi, pelatihan yang mecangkup aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa agar proses kewajiban terhadap pelaporan pertanggungjawaban desa dapat dilaporkan secara tepat waktu sehingga tidak berakibat pada terlambatnya pencairan dana desa pada periode berikutnya.

[71]Yuda, *wawancara*, Profesi Staf Akuntansi Badan Pengelolaan keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, 16 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai tahun 2015 desa akan mendapat dana desa kurang lebih RP.1 Miliar dan desa berkewajiban untuk melaporkan realisasi anggaran dana desa tersebut. Undang-undang Bab 5 pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 tentang indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yakni, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Efektivitas dan Efisiensi. Implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Tejo sudah dilakukan, hal ini dilihat dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan APBDesa dilaporkan per semester dan tahunan. Transparansi pengelolaan keuangan Desa Tejo sudah diimpelementasikan, hal itu telah dibuktikan adanya rapat pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang dilakukan bersama BPD, namun beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh pemerintah desa saja dan pihak yang terkait. Kondisi ini didukung dengan sikap pasif masyarakat, hal itu terbukti masyarakat kurang mempunyai keberanian dalam menyampaikan pendapatnya pada saat Musrenbangdes. Impelementasi efektivitas dan efesiensi sudah dijalankan namun masih perlu diperbaiki, karena dari banyaknya rencana pembangunan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RKPdesa tapi masih belum direalisasikan secara keseluruhan dan masih ada pembangunan yang dilakukan tidak berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Desa Tejo.

2. Kendala implementasi akuntabilitas transparansi partisipasi efektivitas dan efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan Desa Tejo adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan kaur keuangan dalam penatausahaan sehingga laporan pertanggungajawaban tidak dapat tersampaikan tepat waktu sehingga berakibat molornya pencairan dana periode berikutnya oleh pemerintah diatasnya. Belum adanya papan informasi yang menginformasikan pengeluaran dan pemasukan anggaran dan Wesite Desa sebagai media pelayanan publik, manajemen informasi yang menginformasikan kegiatan atau program yang telah dijalankan oleh penyelenggara pemerintahan Desa Tejo. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut sehingga berakibat masyarakat tidak mempunyai *power* atau keberanian menyampaian aspirasinya kepada pemerintah desa pada saat Musyawarah Rencana Pebangunan Desa (Musrenbangdes). Dan perencanaan pembangunan desa belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa secara efektivias dan efisiensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Saran peneliti untuk pemerintahan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro supaya mendorong penyelenggaraan *good governance* agar dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro hendaknya membuat program bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan desa kepada seluruh penyelenggara pemerintahan desa, agar kemampuan sumber daya pemerintah desa lebih meningkat sehingga dapat tercapainya pemerintah yang baik yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan prinsip kepemerintahan yang baik tersebut dapat terimplementasikan untuk tercapainya visi Desa Tejo "Menjadikan Desa Tejo Bangkit Menuju Bojonegoro Matoh".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rizal, *wawancara*, Sekretaris Desa Tejo, 23 Sepetember 2019.

Alfian Hamid, *Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di kecamatan Bontomarannu Kabupeten Gowa), (Jurnal Akuntansi,Vol.6, Universitas Islam Negeri Allauddin Makasar*, 2016).

Ani Susanti Hartoyo,SE, *wawancara*, Kepala Sub Bidang Akuntansi Pertanggungjawban dan Pelaksanaan APBD BPKAD Bojonegoro, 16 September 2019.

Anifah.et.Al.*Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. (Jurnal Akuntansi, Vol.4, Universitas Riau, 2018).

Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparnsi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: : Alfabeta, 2014).

Bisnan, *wawancara*, BPD Desa Tejo, 1 Oktober 2019

Bukit Bukhori Siagan. Et al.*Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pada pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Good Governance*,(Jurnal Akuntansi and Bisnis. Vol.2, Universitas Brawijaya:2016).

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Social & Ekonomi (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi Kebijakan Publik Komunikasi Manajemen dan Pemasaran)*,(Jakarta : Kencana, 2013).

Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social Lainnya* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2008).

Didit Herlianto, *Manajemen Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Gosyen Publishng, 2017).

Fachrul A Siregar, *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jurnal Ekonomi,Vol.2, Universitas Syiah Kuala, 2017)

Hariyadi,*wawancara*, Kaur Keuangan Desa Tejo, 23 September 2019

Hilda Octavana,Siti Muslihah. *Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bantul Yogyakarta*, (Jurnal Akuntansi, Vol.6, Universitas Gadjah Mada, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://regional.kompas.com/read/2018/08/05/08580611/2019-desa-diharapkan-dapat-dana-hingga-rp-13miliar-per-tahun?page=all diakses pada tgl 10 November 2019 diakses pukul 05.04 WIB.

Indra Bastia, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

Kabul Setio Utomo, Et al. *Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. (Jurnal Akuntansi, Vol.13, Universitas Sebelas Maret, 2018).

Khoirul Anam, Profesi sebagai Masyarakat Desa Tejo, dilaksanakan pada tanggal 24 Sepetember 2019.

Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, *Akuntabilitas Dan Good Governance Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, (Jakarta: LAN BPKP RI, 2000).

Lexy,J.Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016).

Loina lalolo Krina, *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Tranparansi dan Partispasi*, (Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003).

Luluk Fikri Zuriyah, *Metode Penelitian kualitatif*, (Surabaya : PT Revka Petra Media, 2012).

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004).

Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (Good Governance)*, (Yogyakarta:Andi Yogyakarta, 2010).

Moch. Qomarudin, *wawancara*,Kepala Desa, 4 September 2019.

Moch. Qomarudin, *wawancara*, Kepala Desa Tejo,15 September 2019.

Moch Qomarudin, *wawancara*, Kepala Desa Tejo, 23 September 2019.

Mudrajat Kuncoro, *Otonomi & Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Erlangga, 2010)

Mudzakir,*wawancara*, Tokoh Agama Desa Tejo, 23 September 2019.

Mustofa Didjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja*, (Jakarta: Lan dan Duta Pertiwi, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panji Santosa, Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance, (Jakarta: Prenada, 2008).

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Pasal 13 Tahun 2010 tentang Desa.

Peraturan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pertanggung Jawaban Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanan Pembangunan Desa

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tantang Pengelolaan Keuangan Desa.

Profil Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2014).

Rocman, *Good Governance:Prinsip, Komponen dan Penerapan*, (Jakarta:Komnas HAM, 2000).

Roekan, *wawancara*, Ketua RT 06 RW 01 Desa Tejo,24 September 2019.

Siti Mahmudah, wawancara, Kaur Perencanaan Desa Tejo, 4 September 2019.

Siti Mahmudah, *wawancara*, Kaur Perencanaan Desa Tejo, 23 September 2019.

Sjamsiar Indraradi, *Etika Birikrasi dan Akuntabilitas pemerintahan*, (Malang : Instrans Publishing, 2017).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017).

Sukairi, *wawancara*, Masyarakat Desa Tejo, 24 September 2019.

Sukardi, Akhmad, *Participatory Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Dearah*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2009).

Syahrul Syamsi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, (Jurnal ilmu Sosial dan Politik, Vol. 3, Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tatag Wiranto, *Akutabilitas konsep dan Tranparansi Dalam Pelayanan Publik*, (Jakarta : Badan Perencanaan pembangunan Nasional, 2009).

Titiek Puji Astuti, Yulianto, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, (Jurnal Akuntansi, Vol. 4, Universitas Setia Budi Surakarta, 2016).

Undang-Undang Nomor 6 Pasal 24 Bab 5 Pasal 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 tentang Desa.

Vera Sri Indah Cicilia, et.al, *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Dikabupaten Minahasa Utara*, (Jurnal Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, 2014)

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Garaha Ilmu,2010).

Yuda, *wawancara*, Staf Akuntansi Badan Pengelolaan keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegor, 16 September 2019

Yul Aeni Yusuf,et al.,*Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berspektif Permendagri Nomor 113 Tahun 2014*, (Jurnal Akuntasi, Vol.12 , Universitas Mataram, 2017).

Zainudin,*wawancara*, Ketua BPD Desa Tejo,23 September 2019.

Zurnia Anni, *wawancara*,Kaur TU dan Umum Desa Tejo, 23 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id